

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perekonomian Provinsi Jambi yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 mencapai Rp81,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp44,15 triliun, Ekonomi Provinsi Jambi triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,16 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 65,51 persen. Ekonomi Jambi triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,15 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,74 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,99 persen. Ekonomi Provinsi Jambi semester I-2024 terhadap semester I tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 4,00 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,08 persen. Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II-2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 34,10 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 66,87 persen.

Pada Juli 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jambi sebesar 2,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,00. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 3,46 persen dengan IHK sebesar 106,85 dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 1,67 persen dengan IHK sebesar 105,72. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 3,54 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 3,05 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,16 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,79 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,79 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,79 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,93 persen; kelompok Pendidikan sebesar 1,16 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,66 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 4,44 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,19 persen. Pada Juli 2024, Provinsi Jambi mengalami deflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,82 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,90 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi y-on-y di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 3,54 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 3,05 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,16 persen;

kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,79, persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,79 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,79 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,93 persen; kelompok Pendidikan sebesar 1,16 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,66 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 4,44 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,19 persen, Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juli 2024, antara lain: beras, emas perhiasan, kentang, cabai merah, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (SKM), petai, cabai rawit, gula pasir, terong, baju muslim wanita, pempek, rekreasi, sigaret kretek tangan (SKT), jengkol, pemeliharaan/service, bawang merah, angkutan udara, tarif kendaraan travel, dan sepeda motor.

Identifikasi permasalahan Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah agar melakukan upaya yang optimal dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Kemendagri pada Triwulan II Tahun 2024, masih ada sejumlah daerah yang sama sekali belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi.
 2. Kondisi sejumlah pasokan komoditas seperti beras, jagung dan bawang merah serta meminta kepada Kepala Daerah agar mewaspadai potensi kenaikan harga jagung yang dapat berdampak pada harga ayam dan telur.
 3. Lebih mengaktifkan Peran TPID di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga Tim Satgas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk, agar melakukan pemantauan harga pangan setiap hari untuk mengetahui informasi penyebab terjadinya kenaikan harga.
 4. Perlunya memperbanyak kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota maupun luar Provinsi untuk mengantisipasi ketersediaan pangan.
 5. Masih ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi masih ragu atau masih takut untuk mempergunakan anggaran BTT.
 6. Perlunya implementasi digital farming pada klaster atau Gapoktan komoditas pangan strategis.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menindaklanjuti Perintah Bapak Presiden RI dan arahan dari Bapak Mendagri RI kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Bersama Mendagri RI, yang dilaksanakan seminggu sekali secara hybrid di daerah masing-masing.

Menindaklanjuti rapat mingguan Mendagri RI secara hybrid, Pemerintah Provinsi Jambi menindaklanjuti rapat tersebut dengan mengadakan rapat lanjutan, hasil rapat lanjutan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya konkret guna menekan inflasi, menjaga ketersediaan bahan pokok, menjaga harga bahan pokok tidak naik dan menjaga penimbunan barang yang dilakukan oleh para pedagang dan distributor.
2. Pemerintah Daerah harus untuk melakukan operasi pasar murah dengan penuh kesungguhan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, tapi kegiatan pasar murah dilakukan secara berkelanjutan agar memiliki dampak yang signifikan dalam pengendalian inflasi.

Pemerintah Daerah memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) di wilayah masing-masing. Sebab, melalui laporan IPH Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga, sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

4. Adapun keenam upaya konkret yang dimaksud yaitu melaksanakan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindag Provinsi Jambi mengintervensi komoditas bahan pangan untuk dilakukan Operasi Pasar (OP) dalam Kota Jambi.
6. Adapun Pasar yang menjadi objek adalah Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar serta Pasar Bungur di Kabupaten Bungo, pasar-pasar tersebut merupakan lokasi pencacahan pedagang oleh BPS Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi memfasilitasi bantuan transportasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar tersebut.
7. Agar Perangkat Daerah dan Dinas Instansi terkait agar mengantisipasi faktor cuaca agar produksi setiap waktu dan internal antar wilayah tetap terjaga, bila terjadi masalah segera menghubungi Bapenas RI untuk meminta solusinya segera.
8. Melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Kepolisian, TNI, BPKP, Tim Penggerak PKK dalam mengendalikan inflasi daerah.
9. Mengadakan MOU antar daerah Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi ketersediaan pangan.
10. Menggalakkan kembali Gerakan Pembelian Beras Lokal/Bulog bagi ASN/karyawan di semua instansi pemerintah dan BUMD/BUMN lingkup Provinsi Jambi.

Adapun kegiatan pengendalian Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi di Triwulan II Tahun 2024, antara lain :

1. Pembatasan Operasional angkutan Barang dan Pengendalian Lalu Lintas pada arus mudik dan arus balik libur Idul Fitri 1444 H tanggal 5 April s/d 16 April 2024 (terlaksananya surat edaran Gubernur Jambi tentang Pembatasan Operasional angkutan Barang dan Pengendalian Lalu Lintas pada masa arus mudik dan arus balik libur lebaran tahun 2024).
2. Tanggal 1 Maret s/d 4 April 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan operasi pasar bahan kebutuhan pokok menjelang HBKN Tahun 2024 (a) Beras sebanyak 55.000 kg, (b) Minyak Goreng sebanyak 11.000 liter, (c) Gula Pasir sebanyak 11.000 kg (wilayah 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi).
3. Tanggal 4 Maret s/d 29 Juli 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dengan komoditi (a) Cabai Rawit Hijau sebanyak 29.000 kg, (b) Cabai Merah sebanyak 30.000 kg (c) beras belido 5 kg sebanyak 4.260 kg, (d) beras belido 10 kg sebanyak 6.220 kg, (e) beras belido 7.940 kg.
4. Pada tanggal 13 Mei 2024 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pembelian Beras Lokal sebanyak 845 kg untuk pengendalian harga beras premium di pasaran.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melakukan kegiatan penyerahan benih ikan dan pakan ikan kepada petani tambak ikan di Provinsi Jambi untuk pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Mei 2024 Penyerah kepada masyarakat - Pokdakan UMEGA Kota Jambi sebanyak 80.510.000
- 3.

- Pada tanggal 28 Mei 2024 penyerahan kepada masyarakat – Pokdakan Bumi Cemerlang Kabupaten Batanghari sebanyak 70.875.000
- Pada tanggal 29 Mei 2024 penyerahan kepada masyarakat – Pokdakan Lebung Mandiri Kabupaten Muaro Jmabi sebanyak 57.125.000
 - Pada tanggal 29 Mei 2024 penyerahan kepada masyarakat – Pokdakan Kedug Banyu Urip Kabupaten Batanghari sebanyak 41.550.000
 - Pada tanggal 1 Juni 2024 penyerahan kepada Ponpes Darul Mustofa Kabupaten Merangin sebanyak 65.660.000
 - Pada tanggal 4 Juni 2024 penyerahan kepada Kelompok UPPKA Sehati Kabupaten Muaro Jambi 86.085.000
 - Pada tanggal 4 Juni 2024 penyerahan kepada Pokdakan Tunas Berkah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi 59.275.000
 - Pada tanggal 6 Juni 2024 penyerahan kepada Ponpes Al-Hidayah Kota Jambi sebanyak 63.795.000
 - Pada tanggal 6 Juni 2024 penyerahan kepada Kelompok Tani Harapan Jaya Bersama Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 23.200.000
 - Pada tanggal 13 Juni 2024 penyerahan kepada SMK PP Negeri Jambi Kabupaten Batanghari sebanyak 59.410.000
 - Pada tanggal 14 Juni 2024 penyerahan kepada kelompok Nagan Jaya I Kabupaten Merangin sebanyak 35.700.000
 - Pada tanggal 14 Juni 2024 penyerahan kepada Pokdakan Mina Guyub Kota Jambi sebanyak 115.970.000
 - Pada tanggal 15 Juni 2024 penyerahan kepada Pokdakan Air Mati Kota Sungai Penuh sebanyak 49.930.000
 - Pada tanggal 21 Juni 2024 penyerahan kepada Pokdakan Lele Titian Rezeki Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 30.800.000
 - Pada tanggal 26 Juni 2024 penyerahan kepada Kelompok Nelayan Bersatu Kabupaten Kabupaten Batanghari sebanyak 49.960.000
 - Pada tanggal 27 Juni 2024 penyerahan kepada Pokdakan Sido Harjo Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 42.700.000
1. Pada tanggal 06 Juni 2024 TPID Provinsi Jambi meresmikan Toko Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kerinci, di Pasar Senen Siulak Kabupaten Kerinci, Peresmian toko TPID Kerinci ini Dalam rangka upaya pengendalian inflasi untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan, khususnya di Kabupaten Kerinci.
 2. Perum BULOG Kanwil Jambi pada tanggal 1 s/d 29 Juli 2024 melakukan kegiatan Operasi Pasar untuk pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, dengan komoditi sebagai berikut :
 - Beras SPHP sebanyak 7.000 kg
 - Beras Premiumsebanyak 3500 kg
 - Gula sebanyak 700 kg
 - Tepung sebanyak 350 kg
 - Minyak sebanyak 840 kg
 1. Perum BULOG Kanwil Jambi pada tanggal 9 Juli 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pasar Murah yang bertempat di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan komoditi sebagai berikut :
 - Beras SPHP sebanyak 1.000 kg
 - Beras Premiumsebanyak 500 kg
 - Gula sebanyak 100 kg
 - Tepung sebanyak 50 kg
 -

Minyak sebanyak 120 kg

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi bersama Mendagri RI yang dilaksanakan setiap hari senin.
2. Pada Tanggal 15 Mei 2024 TPID provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPID Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi, bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :
 - Pada 2024, Kaupaten Kerinci resmi masuk dalam daerah perhitungan inflasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi selain Kota Jambi dan Bungo. Ada dua pasar yang menjadi pencatatan BPS di Kerinci yakni pasar Hiang (buka tiap hari Kamis) dan Siulak (buka tiap hari Senin), kedua pasar tersebut merupakan pasar mingguan. Secara representasi dan metodologi, metodologi pencatatan harga di pasar mingguan memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan pasar harian.
 - Untuk mengendalikan agar inflasi di Kabupaten Kerinci pada BULAN APRIL tidak mengalami kenaikan maka TPID Kabupaten Kerinci harus mengambil langkah-langkah yaitu menjaga harga 2 (dua) komoditas dengan RH tertinggi yaitu Bawang Merah dan Cabai Merah harus berada pada harga minimal sama dengan di BULAN MARET atau dibawah harga pada BULAN MARET.
 - Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengendalikan Inflasi perlu strategi dalam pelaksanaan operasi pasar agar harga komoditi penyumbang inflasi di pasar stabil dan tidak memberatkan masyarakat setempat.
 - Diharapkan TPID Kabupaten Kerinci melakukan pertemuan dengan para Petani atau Distributor dalam pengendalian inflasi.
 - TPID Kabupaten Kerinci melakukan pengawasan pada komoditas penyumbang inflasi di Kabupaten Kerinci yang di produksi di daerah untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan di Kabupaten Kerinci, bila terdapat kelebihan baru dapat dilakukan penjualan keluar daerah.
 - Diperlukannya pembukaan Toko TPID di Pasar Hiang dan Pasar Siulak, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi akan support pilot project pembukaan Toko TPID menunggu kelengkapan data dari Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu Pemerintah Kabupaten Kerinci menyiapkan terlebih dahulu surat tentang pengelola Toko TPID yang kana dibuka).
 - Untuk mengendalikan agar inflasi di Kabupaten Bungo pada BULAN APRIL tidak mengalami kenaikan maka TPID Kabupaten Kerinci harus mengambil langkah-langkah yaitu menjaga harga 4 (empat) komoditas dengan RH tertinggi yaitu Bawang Merah, Cabai Merah, Cabe Rawit dan Daging Ayam Ras harus berada pada harga minimal sama dengan di BULAN MARET atau dibawah harga pada BULAN MARET.
 - Pemerintah Kabupaten Bungo mengharapakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mensupport pengendalian inflasi di Kabupaten Bungo dengan
 - melaksanakan operasi pasar berupa komoditas cabai Merah Keriting dan Cabai Rawit melalui anggaran BTT Provinsi Jambi.
 - TPID Provinsi Jambi dalam waktu dekat akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci (cek Pasar Hiang dan Pasar Siulak serta peresmian Toko TPID di Pasar Siulak).
1. Pada tanggal 2 s/d 4 Juni TPID Provinsi Jambi, TPID Kabupaten Bungo dan TPID Kota Jambi, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus Rapat Koordinasi di Kabupaten Kerinci. Agenda yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024 yakni Launching Toko Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kerinci yang diresmikan oleh Gubernur Jambi, di Pasar Senen Siulak Kabupaten Kerinci, Peresmian toko TPID Kerinci ini Dalam rangka upaya pengendalian inflasi untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan

◦

harga bahan pangan, khususnya di Kabupaten Kerinci, yang kemudian dilanjutkan dengan Berita Rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci yang langsung di pimpin oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. Adapun agenda yang dilakukan pada 4 Juni yakni Rapat Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI.

2. Pada Tanggal 11 Juni 2024, TPID Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H yang di pimpin langsung oleh Bapak Gubernur Jambi bertempat di Ruang Vidcon Rumah Dinas Gubernur Jambi, dengan hasil rapat sebagai berikut :
 - Mengharapkan seluruh Bupati/Walikota bersama TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk tetap memprioritaskan pengendalian inflasi selama Tahun 2024 dengan mempersiapkan program dan anggaran pengendalian inflasi yang mengacu pada koridor 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
 - TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi diharapkan meningkatkan koordinasi pada Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi serta antar Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam mengatasi kendala yang dihadapi untuk pengendalian inflasi.
 - Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk melakukan kegiatan operasi pasar, sidak pasar dan melakukan kegiatan pangan murah diperuntukan harga dipasar stabil dan keterjangkauan harga masyarakat.
 - Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk memaksimalkan Anggaran BTT (Bantuan Tak Terduga) untuk pengendalian inflasi, baik dalam bentuk subsidi produk maupun bantuan sosial pada masyarakat.
1. Pada tanggal 19 Juli 2024, TPID Provinsi Jambi memfasilitasi rapat terkait kerjasama pembelian beras Lokal/Bulog oleh ASN antar PT. Jambi Indoguna Internasional (JII) dan Bulog, kemudian pada tanggal 23 Juli 2024 dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dan pakta integritas pembelian beras Lokal/Bulog oleh ASN yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jambi, hal ini dilaksanakan upaya untuk menekan angka inflasi di Provinsi Jambi.
2. TPID Provinsi Jambi dan TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Capacity Building Pengendalian Inflasi ke Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta tanggal 29 dan 30 Juli 2024, acara tersebut di Pimpin oleh Wakil Gubernur Jambi, dengan rincian sebagai berikut :
3. Tanggal 29 Juli 2024, pukul 08.30 WIB, paparan dan diskusi bersama TPID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, TPID Kota Yogyakarta dan TPID Kabupaten Sleman.
4. Tanggal 30 Juli 2024, pukul 08.00 WIB, kunjungan dan diskusi teknis bersama Kelompok Tani Gisik Pranaji di Kulon Progo.
5. Rekomendasi
 - Diharapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi dan TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk memanfaatkan kegiatan capacity building untuk dapat diimplementasikan ke daerah masing-masing.
 - Untuk TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk selalu sinergi dalam pengendalian di daerah masing-masing dan selalu berkoordinasi dengan TPID Provinsi dan TPIP.
 - Untuk TPID Provinsi Jambi dan TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk fokus pada program unggulan di masing-masing daerah.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlunya Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi atau antar Provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis, MOU yang sudah disepakati perlu ditindaklanjuti dengan Kerjasama Antar Daerah agar kegiatan yang akan dilaksanakan terealisasi dengan efektif.

2. Dalam pembangunan BUMD Pangan di daerah diperlukan dukungan yang kuat dari Kepala Daerah. Sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, maka diperlukan pembentukan BUMD Pangan mengingat Peran BUMD pangan sangat penting sebagai *off taker* hasil pangan lokal, sehingga dapat menjaga pasokan serta harga di tingkat petani dan masyarakat.

3. Dalam pelaporan TPID Award, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi harus konsisten dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sejalan dengan roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun. Selanjutnya, perlu memunculkan aspek inovasi dan digitalisasi dalam perumusan program unggulan.

4. Memperkuat peran dan fungsi TPID Provinsi Jambi sebagai media potensial dalam mengendalikan inflasi sepanjang Tahun 2024 dengan melakukan penguatan kelembagaan TPID, bekerjasama dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi serta instansi terkait dalam peningkatan produksi, efisiensi rantai tata niaga, stabilitasi harga dan penyediaan sarana/prasaran penunjang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlunya meningkatkan Peran aktif TPID Provinsi dalam pembinaan kelembagaan TPID Kab/Kota di Provinsi Jambi sangat strategis dalam mendukung pengendalian inflasi provinsi maupun nasional;

2. Pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dengan cukup signifikan karena berpotensi merugikan produsen seperti petani dan peternak, terutama pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi komoditas pangan.

3. Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk membantu petani mencari langkah antisipasi sehingga produksi komoditas pertanian/pangan tetap dapat dilakukan.

Dalam jangka pendek :

1. Menyusun data neraca pangan Provinsi Jambi sebagai dasar pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Perindag dan Bulog Provinsi Jambi dalam melaksanakan Operasi pasar dan Pasar Murah dalam rangka menjaga stabilitasi harga bahan pokok pada bulan Januari s.d Desember 2024.

3. Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kota/kabupaten di Provinsi Jambi atau antar provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis.

4. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai

perlindungan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu terdampak inflasi. APBD merupakan tulang punggung utama untuk menggerakkan ekonomi, sehingga APBD harus tersalurkan tepat waktu termasuk pemberian bantuan sosial dan dana insentif lainnya.

5. Meningkatkan sinergi Pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi (Rakor) TPID berkala, serta meningkatkan sinergi dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), untuk tahun 2024, telah dilaksanakan GNPIP bersamaan dengan Pekan Nasional Qris di Hotel Aston Kota Jambi, antara lain dengan menggiatkan gerakan pemberian modal bagi pengusaha/UMKM yang bergerak dibidang budidaya cabai, timun, bawang merah, sawi, kangkung, kol dan lain-lain juga pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar (bekerjasama dengan Bank Indonesia).

6. Pemerintah kota/kabupaten perlu meningkatkan proses digitalisasi oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

7. Mengevaluasi Program Unggulan (output) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang didukung oleh TPID Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sehingga secara efektif menjaga capaian inflasi pada level rendah dan stabil, tepat sasaran dalam menyelesaikan problem inflasi daerah serta berada pada track yang sesuai dalam upaya Pengendalian Inflasi daerah.

8. TPID Provinsi Jambi dan instansi terkait terus mengadakan rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan pada hari senin yang bertujuan untuk mengevaluasi komoditas yang menyumbang kenaikan inflasi dan mencari solusi terbaik.

Dalam jangka menengah/panjang :

1. Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Pengendalian Inflasi :

- Monitoring dan evaluasi dan Pengawasan implementasi KAD agar tidak hanya berhenti dengan penandatanganan MoU dan PKS.
- Mendorong Fasilitasi Kerjasama secara Business to Business (B2B), tidak hanya Government to Government (G2G)
- Mendorong peran BUMD Pangan dalam Pelaksanaan KAD, baik untuk pemenuhan kebutuhan di daerah maupun pendistribusian ke daerah lain.

2. Kebijakan *extra effort* masih dilanjutkan sampai akhir tahun 2024 guna menekan laju inflasi kembali ke rentang target sasaran;

3. Tersedianya data merupakan hal yang strategis guna mendukung kebijakan pengendalian harga pangan strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional sehingga perlu sinergi data dan informasi pangan antar lembaga dan/atau daerah yang mencakup harga, pasokan, dan jadwal panen;

4. Pemanfaatan data produksi pertanian sebagai identifikasi potensi KAD karena mayoritas produksi komoditas pangan masih terfokus di wilayah Indonesia bagian Barat terutama Pulau Jawa, sehingga ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan;

5. Melaksanakan aktifitas sesuai dengan peta pangan strategis yang mengindikasikan posisi surplus dan defisit Provinsi Jambi, berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama

inflasi Provinsi Jambi.

6. Mengimplementasikan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024, untuk menjaga Inflasi di daerah;
7. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi produk pangan lokal;
8. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama; dan
9. Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga komoditas hortikultura dengan penyediaan mesin pengawet atau *cold storage*.